



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dicapai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Mengubah ketentuan Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 11 Februari 2019



Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adlisman".

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR .9...



Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya  
Nomor : 3 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

TUJUAN :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Masyarakat cerdas dan berkarakter
3. Meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja
4. Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat
7. Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat
8. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro
9. Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan
10. Meningkatkan ketahanan pangan
11. Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat

12. Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
13. Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
14. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
15. Pembangunan berbasis nagari
16. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya

#### Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan	BPS
3	Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Memperlihatkan perbandingan antara Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran semakin baik	Dinas Nakertrans	BPS
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey	Dinas Nakertrans	BPS
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	Pengukuran peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pengukuran ini mencakup partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB
5	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	Persen	Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik	Dinas Sosial dan P3AP2KB	Dinas Sosial dan P3AP2KB
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
7	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni	Cakupan rumah layak huni	Persen	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
8	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	Tersedianya akses terhadap air minum yang layak	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Akses Sanitasi Layak	Persen	Tersedianya akses sanitasi yang layak	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	BPS	BPS
		Pertumbuhan PDRB	Indeks	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	BPS	BPS
		PDRB Perkapita	Juta	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan	BPS	BPS
		Indeks Gini	Indeks	Salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi	BPS	BPS
10	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Jumlah produksi padi	Ton	Total produksi padi dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi karet	Ton	Total produksi karet dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi sawit	Ton	Total produksi sawit dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS
		Jumlah produksi daging sapi	Ton	Total populasi ternak sapi dalam setahun	Dinas Pertanian	BPS



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Jumlah produksi Perikanan	Ton	Total produksi ikan dalam setahun	Dinas Pangan dan Perikanan	BPS
	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	Koperasi	UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi	Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag
11	Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat	Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	Persentase jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag
12	Meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen	Pasar dalam kondisi baik	Persen	Persentase pengukuran terhadap kondisi pasar yang ada di Kecamatan atau Nagari se-Kabupaten Dharmasraya	Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag
13	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Pengukuran terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan dan citra satelit	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14	Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	BKD	BKD
15		Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat	Setda	Setda
		Nilai LPPD	Nilai	Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran	Setda	Setda
		Tingkat kapabilitas APIP	Nilai	Penilaian secara mandiri ( <i>self assessment</i> ) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM).	Inspektorat	Inspektorat
	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	Persen	Persentase pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan yang terdapat pada RKPD terhadap RPJMD	BAPPEDA	BAPPEDA
16	Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	Persentase ketergantungan terhadap dana transfer	BKD	BKD
17	Meningkatkan pembangunan Nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	Persentase jumlah Nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	Angka	Jumlah situs dan cagar budaya yang terdapat di Dharmasraya dan dilestarikan	Dinas Budparpora	Dinas Budparpora



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
19	terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	Unit	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Dharmasraya dan dilestarikan	Dinas Budparpora	Dinas Budparpora

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA

